



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAMBI

2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai salah satu instrumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, serta target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2026. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sektor perhubungan, baik antarbidang di lingkungan Dinas Perhubungan maupun dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Dokumen Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu, Renja ini juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Provinsi Jambi.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Jambi, 2025

KEPALA DINAS,

Dr.Drs.H. JOHN EKA POWA, ME

Pembina Utama Madya

NIP. 19681220 198810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	48
3.3 Program dan Kegiatan.....	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	68
BAB V PENUTUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025- 2029. Penyusunan Renja Tahun 2026 juga menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2025 tentang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026.

Sebagai tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, Renja Tahun 2026 diarahkan untuk memantapkan pencapaian visi pembangunan daerah yaitu “Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”. Dalam konteks sektor transportasi, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan konektivitas wilayah, keselamatan transportasi, serta pengembangan sistem transportasi cerdas (smart transportation) yang berkelanjutan.

Tema pembangunan daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam RKPD adalah: “Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Oleh karena itu, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur transportasi yang selamat, andal, dan efisien, serta penguatan tata kelola transportasi berbasis data dan teknologi. Renja ini disusun dengan memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu:

1. Pendekatan teknokratik, melalui analisis kondisi objektif sektor transportasi dan hasil evaluasi tahun sebelumnya;
2. Pendekatan partisipatif, dengan memperhatikan masukan masyarakat dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);

3. Pendekatan top-down dan bottom-up, untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; serta
4. Pendekatan politik, dengan memperhatikan arah kebijakan kepala daerah dan prioritas RPJMD.

Dengan demikian, dokumen Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun anggaran 2026, serta sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang perhubungan di Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
- F. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026;
- G. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2026; dan
- H. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 adalah untuk merumuskan arah kebijakan, prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

- A. Menjabarkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- B. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026; dan
- C. Menjamin keterpaduan arah kebijakan transportasi daerah dengan RKPD 2026 dan prioritas nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 5 PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun lalu secara umum telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan konektivitas transportasi, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta peningkatan kualitas pelayanan perhubungan guna mendukung mobilitas orang dan barang antarwilayah di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar indikator kinerja program telah mencapai target yang ditetapkan namun demikian, evaluasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi anggaran, dinamika kebijakan pusat dan daerah, serta kendala teknis di lapangan seperti keterbatasan data pendukung, koordinasi lintas sektor, dan kondisi geografis wilayah pelayanan. Dampak dari kendala tersebut menyebabkan sebagian target Renja belum sepenuhnya mendukung percepatan pencapaian sasaran strategis Renstra.:

Lebih lanjut capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Jambi

Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra Dishub) Tahun 2026	Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Dishub Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Dishub Tahun 2024	Realisasi Renja Dishub Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	91%	70%	75%	70%	93%	77%	72%	79%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	4	4	4	2	50%	5	4	92%
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana(spasi)Induk Jaringan LLAJ Provinsi	4	4	4	3	75%	4	4	92%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100%	50%	100%	3%	3%	50%	34%	34%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3	1	3	1	33%	3	2	56%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	85%	100%	100%	50%	50%	100%	83%	98%
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Type B	60	30	30	60	200%	60	50	83%

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLA J di Jalan	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan(spasi)Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor(spasi)Provinsi	4	0	4	0	0%	4	1	33%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%	75%	75%	75%	83%	83%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)(spasi)Provinsi	12	4	4	3	75%	12	6	53%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)(spasi)Daerah Provinsi	5	4	4	3	75%	10	6	113%
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	55%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	61%

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	0%
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0%	0%	100%	0%	0%	30%	10%	0%
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0%	0%	100%	0%	0%	20%	7%	0%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%	50%	50%	100%	83%	83%

Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas(spasi)Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3	4	4	2	50%	2	3	89%
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100%	75%	65%	62%	95%	70%	69%	69%
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	83%	83%
Koordinasi dan(spasi)Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	3	4	4	3	75%	3	3	111%

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	100%	100%	75%	75%	100%	92%	92%

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan(spasi)Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4	4	4	3	75%	4	4	92%
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	0%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	0%
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	0	0	0	0%	4	1	33%
Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	0%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	0%
Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%

Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	0%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	0%
Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	0%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	75%	0%	60%	31%	51%	65%	32%	43%
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	4	0	4	0	0%	4	1,33	33%
Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	4	0	4	0	0%	4	1,33	33%
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	0	4	0	0%	4	1,33	33%
Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	4	0	4	0	0%	4	1,33	33%

Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	0	4	0	0%	4	1,33	33%
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	4	0	4	0	0%	4	1,33	33%
Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	0	4	0	0%	4	1,33	33%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	87%	55%	75%	50%	67%	65%	57%	65%
Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	60%	100%	65%	65%	85%	70%	70%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	3	75%	4	4	92%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	3	4	4	2	50%	1	2	78%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87%	95%	100%	75%	75%	85%	85%	98%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87%	95%	100%	75%	75%	95%	88%	102%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	4	3	75%	4	4	92%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	100%	75%	75%	100%	58%	58%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	0	1	0	0%	1	0	33%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	75%	75%	100%	92%	92%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	0	0	0	0%	80%	0	5%
Penyediaan Komponen Instalasi(spasi)Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	0	0	0	0%	80%	0	27%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	4	4	3	75%	1	3	53%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	4	4	3	75%	4	4	73%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	0	0%	4	1	33%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	4	4	3	75%	1	3	53%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	4	3	75%	4	4	92%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33%
Pengadaan Sarana dan(spasi)Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	0	0	0	0%	2	1	22%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	75%	75%	100%	92%	92%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	0	0	0	0%	1	0	8%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	6	50%	1	6	53%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	4	4	3	75%	12	6	53%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	100%	100%	75%	75%	100%	92%	102%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya(spasi)Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	4	4	3	75%	4	4	92%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	0	1	0	0%	1	0	33%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	0	1	0	0%	1	0	33%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi atas capaian kinerja layanan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

No	Indikator	SPM/S tandar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Konektivitas Provinsi		Konektivitas Provinsi	0,5410	0,5420	0,5371	0,5552	0,5874		0,5371	0,5552	
2	Kinerja Lalu Lintas			0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,53	0,55	0,55	
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah		Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah			40	43			43	43	
4	Indeks Kepuasan Masyaakat (IKM)			75,6	77,2	77	77,55	76,78		77	77,55	
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			B (64)	B (65)	65 (B)	67 (B)	B (63,1)		65 (B)	67 (B)	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan beberapa identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan arah kebijakan pembangunan di sektor perhubungan dalam wilayah Provinsi Jambi diatas, maka beberapa isu-isu strategis yang berkembang antara lain adalah :

A. Pengembangan Jaringan Transportasi

1. Belum optimalnya perencanaan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan akibat keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi lintas sektor, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan konektivitas transportasi laut dan menurunkan efektivitas pelayanan logistik daerah.

Belum optimalnya perencanaan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan pada wilayah Provinsi Jambi disebabkan oleh sejumlah faktor strategis yang saling berkaitan. Keterbatasan alokasi anggaran, menyebabkan proses perencanaan, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan fasilitas penunjang di pelabuhan tidak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada lambatnya peningkatan kapasitas operasional, keterbatasan sarana bongkar muat, serta kurang memadainya aksesibilitas menuju kawasan pelabuhan.

Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta pelaku usaha sektor transportasi dan logistik turut memperburuk efektivitas proses perencanaan. Ketidaksinkronan kebijakan dan program antar instansi menyebabkan tidak tercapainya integrasi yang baik antara jaringan transportasi laut dengan jaringan transportasi darat maupun sungai. Hal ini mengakibatkan terhambatnya upaya mewujudkan sistem logistik daerah yang efisien, andal, dan berdaya saing.

Ketidakterpaduan tersebut pada akhirnya menimbulkan gangguan pada kelancaran arus distribusi barang, meningkatnya biaya logistik, serta rendahnya kualitas pelayanan kepada pelaku industri dan masyarakat. Apabila permasalahan ini tidak ditangani secara serius, maka potensi Pelabuhan Pengumpan sebagai simpul strategis dalam mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak akan berkembang secara optimal.

2. Belum jelasnya kewenangan dan tata kelola parkir pada ruas jalan provinsi yang menyebabkan ketidakteraturan parkir, menghambat kelancaran lalu lintas, dan belum optimalnya kontribusi PAD sektor perparkiran.

Ketidajelasan kewenangan dalam pengelolaan parkir pada ruas jalan provinsi masih menjadi permasalahan mendasar yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan transportasi daerah. Hingga saat ini, belum terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pihak ketiga yang berpotensi terlibat dalam penyelenggaraan perparkiran. Kondisi tersebut menyebabkan tidak konsistennya penerapan regulasi, lemahnya pengawasan di lapangan, serta terjadinya praktik parkir yang tidak terkendali.

Ketidakteraturan parkir tersebut berkontribusi pada meningkatnya gangguan terhadap arus lalu lintas, seperti penyempitan ruang gerak kendaraan, terjadinya antrian, dan penurunan tingkat pelayanan jalan. Selain berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat, tata kelola yang tidak tertib juga menghambat optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran. Banyak titik parkir yang beroperasi tanpa izin, tidak terdata, ataupun tidak menyetorkan retribusi secara proporsional, sehingga potensi pendapatan daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan kelembagaan terkait kewenangan pengelolaan parkir pada ruas jalan provinsi, termasuk harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penataan tersebut penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan parkir yang tertib dan profesional, serta pengelolaan potensi PAD yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan tata kelola yang jelas dan terintegrasi, sektor perparkiran dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pelayanan transportasi maupun pendapatan daerah.

B. Perhubungan Darat dan Perkeretaapian

1. Belum terpenuhinya standar minimal fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL, PJU) yang berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan dan rendahnya kualitas pelayanan transportasi, sehingga diperlukan percepatan pemenuhan fasilitas sesuai SPM.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), dan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan komponen utama dalam mendukung terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Namun, pada kondisi eksisting saat ini, sebagian besar fasilitas tersebut belum terpenuhi secara optimal baik dari segi jumlah, kondisi fisik, maupun standar teknis yang dipersyaratkan. Ketidakterpenuhan fasilitas perlengkapan jalan tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat keselamatan jalan, meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas, serta menurunnya kualitas pelayanan transportasi bagi pengguna jalan.

Keterbatasan rambu dan marka membuat informasi bagi pengguna jalan menjadi kurang jelas sehingga meningkatkan potensi pelanggaran dan konflik lalu lintas. Demikian pula, kondisi APILL yang tidak memadai atau tidak berfungsi optimal dapat menimbulkan kemacetan maupun risiko

kecelakaan pada persimpangan. Selain itu, keterbatasan PJU terutama pada jalan-jalan strategis dan kawasan rawan kecelakaan berkontribusi pada rendahnya visibilitas pengemudi pada malam hari, sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden lalu lintas.

Melihat dampak yang ditimbulkan, isu ini menjadi sangat strategis dan membutuhkan penanganan segera. Pemerintah daerah perlu melakukan percepatan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan secara menyeluruh yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pedoman teknis yang berlaku. Upaya yang dilakukan dapat berupa inventarisasi kondisi eksisting, penyusunan prioritas penanganan pada kawasan rawan kecelakaan, peningkatan alokasi anggaran, koordinasi lintas sektor, serta penguatan pengawasan dan pemeliharaan rutin. Dengan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai SPM, diharapkan keselamatan lalu lintas meningkat, kualitas pelayanan transportasi membaik, serta tercipta lingkungan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

2. Masih tingginya pelanggaran ODOL yang menyebabkan kerusakan jalan, menurunkan keselamatan transportasi, serta meningkatnya biaya pemeliharaan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terpadu.

Masih tingginya pelanggaran Over Dimension and Over Loading (ODOL) pada kendaraan angkutan barang menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan transportasi darat. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan percepatan kerusakan infrastruktur jalan—karena beban kendaraan yang melampaui kapasitas rancangannya—tetapi juga menurunkan tingkat keselamatan transportasi, baik bagi pengemudi kendaraan barang maupun pengguna jalan lainnya. Pelanggaran ODOL turut menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan melalui meningkatnya biaya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, terganggunya

kelancaran arus distribusi barang, serta menurunnya umur layanan prasarana transportasi.

Selain itu, tingginya kasus ODOL menunjukkan bahwa penerapan regulasi yang ada belum berjalan optimal, baik dari sisi efektivitas penegakan hukum, integrasi sistem pengawasan, maupun kesadaran pelaku usaha angkutan barang terhadap pentingnya kepatuhan terhadap standar teknis kendaraan. Koordinasi lintas sektor antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, pemilik kendaraan, dan pelaku logistik masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa upaya pengendalian ODOL dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan terpadu pada titik-titik rawan pelanggaran, pemanfaatan teknologi timbang dinamis (WIM), serta kampanye berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan dan budaya keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan barang.

3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dalam perencanaan dan penyediaan fasilitas keselamatan pada pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di Jambi.

Koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan penyediaan fasilitas keselamatan pada pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di Jambi masih belum optimal. Meskipun pembangunan infrastruktur jalan khusus untuk angkutan batu bara sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor industri, terutama di daerah penghasil batu bara, namun minimnya koordinasi antara berbagai pihak terkait menyebabkan beberapa masalah yang menghambat efektivitasnya. Kurangnya integrasi antara instansi pemerintah daerah, pengusaha, dan lembaga terkait dalam merencanakan serta menyediakan fasilitas keselamatan yang memadai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan transportasi dan keberlanjutan operasional. Tanpa adanya standarisasi keselamatan yang jelas dan koordinasi yang efektif, risiko kecelakaan di

jalan angkutan batu bara semakin tinggi, yang tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga memperburuk dampak lingkungan dan sosial di sekitar kawasan tersebut.

Selain itu, ketidakberlanjutannya pengawasan serta pembagian peran yang tidak jelas antara sektor yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan jalan ini semakin memperburuk situasi. Di satu sisi, angkutan batu bara yang tidak terkelola dengan baik dapat menambah kemacetan, kerusakan jalan, dan polusi udara, sementara di sisi lain, kurangnya perhatian terhadap aspek keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur menambah beban pada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas keselamatan di sepanjang jalan angkutan batu bara. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan kerjasama antarinstansi, penerapan regulasi yang lebih ketat, serta penerapan teknologi dan sistem manajemen yang mendukung keselamatan transportasi yang lebih baik. Dengan koordinasi yang lebih terstruktur, diharapkan pembangunan jalan angkutan batu bara dapat mendukung ekonomi daerah tanpa mengorbankan keselamatan dan kualitas lingkungan.

4. Belum tersedianya layanan angkutan umum di wilayah terpencil yang menurunkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar dan menghambat pemerataan pembangunan, sehingga diperlukan penyediaan angkutan perintis yang berkelanjutan

Ketersediaan layanan angkutan umum di wilayah terpencil masih belum memadai, baik dari sisi jumlah armada, jangkauan trayek, maupun frekuensi pelayanan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di kawasan tersebut mengalami keterbatasan akses menuju pusat-pusat aktivitas, seperti fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pusat pemerintahan, dan kawasan ekonomi. Rendahnya tingkat aksesibilitas ini berdampak

langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, karena menghambat mobilitas penduduk, mengurangi peluang ekonomi, serta memperlambat proses pemerataan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, ketidaktersediaan layanan angkutan umum yang memadai di wilayah terpencil juga menimbulkan ketergantungan pada moda transportasi pribadi yang tidak semua penduduk mampu miliki. Hal ini memperbesar kesenjangan sosial dan semakin meminggirkan kelompok rentan seperti pelajar, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada transportasi publik. Di sisi lain, kondisi geografis wilayah terpencil yang sering kali sulit dijangkau turut memperumit penyediaan layanan transportasi yang berkelanjutan jika tidak direncanakan secara komprehensif.

Oleh karena itu, diperlukan penyediaan angkutan perintis yang dirancang secara berkelanjutan, baik melalui penguatan dukungan pemerintah, penyusunan pola layanan berbasis kebutuhan masyarakat, maupun pemanfaatan skema pembiayaan yang efisien. Angkutan perintis diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh kawasan provinsi secara merata. Penyediaan layanan ini tidak hanya menjadi kebutuhan transportasi, tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan keadilan akses dan pemerataan pembangunan.

C. Perhubungan Laut, Sungai, Danau Penyeberangan, dan Udara

1. Belum terpenuhinya dokumen legalitas pelabuhan dan standar alur pelayaran (DLKp/DLKr, peta alur, panduan pelayaran) serta minimnya sarana prasarana keselamatan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan transportasi sungai.

Belum lengkapnya dokumen legalitas pelabuhan termasuk Dokumen Lingkungan Kepelabuhanan (DLKp), Dokumen Lingkungan Perairan (DLKr), peta alur pelayaran, serta panduan pelayaran menunjukkan bahwa kegiatan operasional pada kawasan pelabuhan dan perairan sungai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan normatif yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketidakterdediaan dokumen tersebut mengakibatkan tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam pengaturan pemanfaatan ruang perairan, penetapan batas-batas wilayah kerja pelabuhan, maupun pengaturan aktivitas lalu lintas sungai. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam penyelenggaraan jasa kepelabuhanan dan pengoperasian angkutan sungai, serta menyulitkan proses pengawasan dan penegakan aturan.

Selain itu, belum tersusunnya standar alur pelayaran dan panduan navigasi yang memadai menyebabkan operator kapal, nakhoda, maupun pengguna jasa transportasi sungai tidak memperoleh informasi yang jelas dan mutakhir terkait kondisi alur, kedalaman perairan, titik rawan, maupun pola pergerakan lalu lintas. Ketiadaan standar tersebut berdampak pada meningkatnya peluang terjadinya kesalahan navigasi, terutama pada musim tertentu ketika kondisi sungai berubah akibat sedimentasi, pasang-surut, atau peningkatan debit air.

Di sisi lain, minimnya penyediaan sarana dan prasarana keselamatan seperti rambu-rambu pelayaran, penerangan alur, ketapel atau ring buoy, pos pengawasan keselamatan, hingga fasilitas pertolongan kecelakaan semakin memperbesar risiko terjadinya insiden di perairan. Keterbatasan ini menghambat upaya pencegahan dan mitigasi kecelakaan, sekaligus mengurangi tingkat kesiapsiagaan dalam penanganan keadaan darurat.

Akumulasi dari berbagai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan transportasi sungai, baik berupa tubrukan antarkapal, kandas, maupun kecelakaan penumpang. Oleh karena itu, pemenuhan dokumen legalitas, standar alur pelayaran,

serta peningkatan sarana prasarana keselamatan menjadi faktor krusial untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi sungai yang aman, tertib, dan sesuai standar pelayanan minimal.

2. Tertundanya serah terima kewenangan pengelolaan Pelabuhan Pengumpan dan belum selesainya pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang menghambat optimalisasi peran provinsi serta menurunkan konektivitas ekonomi kawasan Ujung Jabung, sehingga diperlukan percepatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Tertundanya proses serah terima kewenangan pengelolaan pelabuhan pengumpan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jambi menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penyelenggaraan layanan transportasi laut di wilayah provinsi. Ketidakjelasan status kewenangan tersebut menyebabkan pemerintah daerah belum dapat melakukan perencanaan, penganggaran, maupun intervensi kebijakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kepelabuhanan. Akibatnya, berbagai potensi pengembangan pelabuhan baik dalam aspek operasional, peningkatan fasilitas, maupun pemanfaatan ekonomi belum dapat dimaksimalkan.

Di sisi lain, pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang hingga saat ini belum terselesaikan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja konektivitas wilayah. Pelabuhan ini dirancang sebagai simpul logistik strategis yang berfungsi mendukung distribusi barang, memperkuat rantai pasok, dan membuka akses perdagangan yang lebih kompetitif bagi Provinsi Jambi, khususnya kawasan Ujung Jabung dan wilayah hinterland-nya. Ketertundaan penyelesaian pembangunan tersebut mengakibatkan pemanfaatan potensi ekonomi di kawasan tersebut berjalan tidak optimal, terutama dalam hal peningkatan arus

barang, pengembangan industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir.

Kedua permasalahan tersebut secara langsung membatasi kemampuan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan peran strategisnya untuk memperkuat konektivitas dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah percepatan melalui koordinasi intensif dan berkelanjutan dengan Pemerintah Pusat, baik dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur pelabuhan maupun dalam proses penyerahan kewenangan pengelolaan. Koordinasi ini menjadi krusial untuk memastikan adanya kepastian regulasi, sinkronisasi program, serta dukungan pendanaan yang diperlukan agar pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung dan pelabuhan pengumpan lainnya dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta perekonomian daerah.

D. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. Keterbatasan armada dan infrastruktur pendukung BRT Trans Siginjai yang menyebabkan rendahnya kualitas layanan, tidak tercapainya efisiensi rute (load factor, OTP), dan menurunnya kepercayaan publik, sehingga diperlukan evaluasi tratek, penambahan armada dan perbaikan halte.

Keterbatasan armada dan infrastruktur pendukung Bus Rapid Transit (BRT) Trans Siginjai menjadi salah satu permasalahan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan transportasi umum di Provinsi Jambi. Jumlah armada yang tidak memadai menyebabkan frekuensi keberangkatan tidak konsisten serta headway menjadi panjang, sehingga waktu tunggu penumpang meningkat dan kenyamanan pengguna menurun. Hal ini semakin diperburuk oleh kondisi sebagian armada yang sudah tidak optimal dari sisi kelaikan operasi, sehingga menghambat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) BRT.

Permasalahan tersebut turut berdampak pada rendahnya efisiensi rute, yang tercermin dari capaian load factor yang belum ideal serta rendahnya On Time Performance (OTP). Ketidakefisienan ini menunjukkan bahwa operasional layanan belum berjalan sesuai perencanaan jaringan trayek dan kebutuhan pergerakan masyarakat. Beberapa halte dan fasilitas pendukung juga berada dalam kondisi kurang terawat, tidak lengkap, atau berlokasi pada titik yang kurang strategis, sehingga mengurangi keterhubungan (connectivity) dan aksesibilitas pengguna terhadap layanan BRT.

Kondisi ini bertahap menurunkan kepercayaan publik terhadap BRT Trans Siginjai, yang kemudian berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Apabila tidak ditangani secara komprehensif, persoalan tersebut berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan rekayasa lalu lintas (tratek) untuk memastikan kesesuaian rute, pola operasi, dan integrasi layanan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Selain itu, penambahan armada baru yang lebih andal, ramah lingkungan, dan sesuai standar teknis menjadi krusial untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas operasional. Perbaikan serta penataan ulang halte dan infrastruktur pendukung lainnya juga perlu dilakukan guna memperkuat kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan akses bagi pengguna. Dengan serangkaian upaya tersebut, diharapkan layanan BRT Trans Siginjai dapat kembali memenuhi harapan publik sekaligus menjadi moda transportasi umum yang layak, efisien, dan berkelanjutan.

2. Menurunnya fungsi Terminal Tipe B sebagai simpul transportasi dan hilangnya potensi PAD akibat penghapusan retribusi terminal, sehingga

diperlukan inovasi layanan dan optimalisasi aset untuk menciptakan sumber PAD non-retribusi.

Menurunnya fungsi Terminal Tipe B sebagai salah satu simpul transportasi regional menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Terminal yang seharusnya berperan sebagai pusat pelayanan perpindahan moda, pengendali arus lalu lintas, dan ruang integrasi antarmoda, kini mengalami penurunan kinerja akibat minimnya aktivitas kendaraan dan penumpang. Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan penghapusan retribusi terminal sesuai peraturan perundang-undangan, yang secara langsung menghilangkan salah satu sumber pendapatan daerah yang selama ini menjadi penopang operasional terminal. Hilangnya retribusi mengakibatkan pemerintah daerah harus mencari alternatif pendapatan lain agar terminal tetap dapat berfungsi optimal tanpa membebani anggaran daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah inovatif melalui pengembangan layanan baru dan optimalisasi pemanfaatan seluruh aset terminal. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan ruang usaha, pemanfaatan lahan untuk kegiatan komersial, kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak ketiga, digitalisasi layanan terminal, serta pengembangan fungsi terminal sebagai pusat layanan publik dan logistik. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik terminal bagi operator angkutan, pelaku usaha, maupun masyarakat, sehingga peran terminal sebagai simpul transportasi kembali berjalan sesuai fungsinya.

Dengan demikian, strategi pengembangan terminal tidak hanya berfokus pada pemulihan fungsi transportasi, tetapi juga diarahkan pada penciptaan sumber PAD non-retribusi yang berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan terminal, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi

terhadap pendapatan daerah tanpa melanggar regulasi terkait penghapusan retribusi.

3. Masih tingginya ketergantungan sejumlah trayek angkutan umum terhadap subsidi akibat rendahnya kelayakan operasional, sehingga diperlukan perbaikan perencanaan trayek dan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Tingginya ketergantungan sejumlah trayek angkutan umum terhadap subsidi menunjukkan bahwa kinerja operasional pada sebagian besar rute belum mampu mencapai tingkat keekonomian yang memadai. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan yang diperoleh dari penumpang, baik karena rendahnya jumlah pengguna layanan, ketidaksesuaian rute dengan pola perjalanan masyarakat, maupun efisiensi armada dan jadwal yang belum optimal. Situasi tersebut berdampak pada meningkatnya beban fiskal pemerintah serta menurunkan kemampuan penyedia layanan dalam mempertahankan kualitas pelayanan secara mandiri.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan perencanaan trayek secara komprehensif, yang mencakup penataan ulang jaringan trayek berdasarkan analisis permintaan perjalanan, integrasi antar-moda, serta optimalisasi pola operasi sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi. Hal ini dapat dilakukan melalui diversifikasi sumber pendanaan, peningkatan efisiensi operasional, skema kemitraan dengan pihak swasta, serta penerapan mekanisme pendanaan berbasis kinerja. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian operasional angkutan umum sekaligus memperkuat keberlanjutan layanan transportasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 tetap berada dalam koridor kebijakan pembangunan daerah serta konsisten dengan prioritas tahunan pemerintah provinsi.

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jambi	Meningkatnya Nilai SAKIP	87%	Rp19.050.900.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jambi	Meningkatnya Nilai SAKIP	87%	Rp19.050.900.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp1.150.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp1.150.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan	80%	Rp10.400.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan	80%	Rp10.400.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang terlaksana	80%	Rp700.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang terlaksana	80%	Rp700.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jambi	Persentase Administrasi(spasi)umum yang terlaksana(spasi)Persentase penyediaan(spasi)Administra si Umum OPD	80%	Rp1.300.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jambi	Persentase Administrasi(spasi)umum yang terlaksana(spasi)Persentase penyediaan(spasi)Administra si Umum OPD	80%	Rp1.300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana(spasi)Tersedianya Barang/peralatan kantor	100%	Rp1.602.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana(spasi)Tersedianya Barang/peralatan kantor	100%	Rp1.602.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase Penyediaan Jasa(spasi)Penunjang Urusan Pemerintah(spasi)Daerah	100%	Rp900.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase Penyediaan Jasa(spasi)Penunjang Urusan Pemerintah(spasi)Daerah	100%	Rp900.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jambi	Persentase Pemeliharaan Barang(spasi)Milik Daerah Penunjang Urusan(spasi)Pemerintahan Daerah	70%	Rp2.998.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jambi	Persentase Pemeliharaan Barang(spasi)Milik Daerah Penunjang Urusan(spasi)Pemerintahan Daerah	70%	Rp2.998.400.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jambi	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	91%	Rp33.358.898.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jambi	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	91%	Rp33.358.898.000	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jambi	Meningkatnya kualitas, perencanaan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100%	Rp2.410.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jambi	Meningkatnya kualitas, perencanaan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100%	Rp2.410.000.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jambi	Tersedianya perlengkapan Jalan, prasarana keselamatan jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan berfungsi fasilitas keselamatan jalan dengan baik.	100%	Rp15.790.898.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jambi	Tersedianya perlengkapan Jalan, prasarana keselamatan jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan berfungsi fasilitas keselamatan jalan dengan baik.	100%	Rp15.790.898.000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jambi	Terpenuhinya SPM Pelayanan dan operasional Terminal Tipe B	50%	Rp2.500.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jambi	Terpenuhinya SPM Pelayanan dan operasional Terminal Tipe B	50%	Rp2.500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jambi	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%	Rp2.200.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jambi	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%	Rp2.200.000.000	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jambi	Terpenuhinya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	100%	Rp200.000.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jambi	Terpenuhinya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	100%	Rp200.000.000	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jambi	Terlaksananya kegiatan inspeksi, pengawasan, pemantauan dan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Jalan	100%	Rp1.125.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jambi	Terlaksananya kegiatan inspeksi, pengawasan, pemantauan dan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Jalan	100%	Rp1.125.000.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya Angkutan Umum Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang berkeselamatan	100%	Rp6.686.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya Angkutan Umum Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang berkeselamatan	100%	Rp6.686.000.000	
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Antar Kota Antar Kabupaten	55%	Rp347.000.000	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Antar Kota Antar Kabupaten	55%	Rp347.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Antar Kabupaten	-	-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Antar Kabupaten	-	-	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Antar Kabupaten	-	-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Antar Kabupaten	-	-	
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten	-	-	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten	-	-	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp400.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp400.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp400.000.000	
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp1.300.000.000	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp1.300.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jambi	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	100%	Rp6.386.125.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jambi	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	100%	Rp6.386.125.000	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jambi	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp350.000.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jambi	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jambi	Terpenuhinya zin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	100%	Rp350.000.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jambi	Terpenuhinya zin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	100%	Rp350.000.000	
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jambi	Terpenuhinya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	100%	Rp1.101.125.000	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jambi	Terpenuhinya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	100%	Rp1.101.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau(spasi)Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jambi	Terwujudnya jaringan Lintas Penyeberangan dan sertifikasi kapal dalam daerah Provinsi Jambi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau(spasi)Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	100%	Rp400.000.000	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau(spasi)Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jambi	Terwujudnya jaringan Lintas Penyeberangan dan sertifikasi kapal dalam daerah Provinsi Jambi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau(spasi)Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	100%	Rp400.000.000	
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Terwujudnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Rp250.000.000	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Terwujudnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Rp250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau(spasi)Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jambi	Terpenuhinya Perilzinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau(spasi)Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100%	Rp350.000.000	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jambi	Terpenuhinya Perilzinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau(spasi)Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100%	Rp350.000.000	
	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah(spasi)Provinsi	Jambi	Terwujudnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	100%	Rp285.000.000	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah(spasi)Provinsi	Jambi	Terwujudnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	100%	Rp285.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Tersediannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp1.550.000.000	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Tersediannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp1.550.000.000	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terbangunnya dan Terpeliharanya serta beroperasinya Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terbangunnya dan Terpeliharanya serta beroperasinya Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Terbangun dan terwujudnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Rp500.000.000	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	Terbangun dan terwujudnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Rp500.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terpenuhinya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp500.000.000	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terpenuhinya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	
	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp300.000.000	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp300.000.000	
	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terpenuhinya Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terpenuhinya Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	
	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terpenuhinya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp450.000.000	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terpenuhinya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp450.000.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terpenuhinya Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam (spasi)DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	Terpenuhinya Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam (spasi)DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, monitoring, dan sinkronisasi pengawasan, pengendalian, dan penertiban operasional angkutan laut	Jambi	Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan laut dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing	-	-	Koordinasi, monitoring, dan sinkronisasi pengawasan, pengendalian, dan penertiban operasional angkutan laut	Jambi	Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan laut dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing	-	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan tahapan yang dilakukan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan perangkat daerah. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah menghimpun usulan dari Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan unsur vertikal sebagai rekan untuk mendukung penyelenggaraan urusan perhubungan. Adapun usulan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan Tiap Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN
1	2	3	4	5
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan			Peningkatan Fasilitas perlengkapan jalan merupakan bagian dari IKU dan IKK yaitu Tersedianya Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Ideal
	Peningkatan APILL ke ATCS	KOTA JAMBI	3 Lokasi	
	Kajian MRLM Persimpangan Ruas Jalan Provinsi		1 Paket	
	Zona Selamat Sekolah		4 Lokasi	
	Red Karpet/Yellow Box/Zebra Cross/ Pita Penggaduh		1 Paket	
	Fly Over (Jalan Layang)			
	Outer Ring Road Jalan Lingkar			
	Rambu Larangan Tipe F		1 Paket	

	Rambu Lalu Lintas (uk 75 x75 cm)	KAB.MERANGIN		
	RPPJ (uk 120 x 180 cm)	Pulau Rengas- Jangkat	200 Unit	
	Pagar Pengaman Jalan (Guadril)	Pulau Rengas- Jangkat	20 Unit	
	Delinator	Pulau Rengas- Jangkat	30 Unit	
	Pengadaan Roadbarrier	Pematang Kandis	400 Unit	
	Pengadaan Trafiic Con	Pematang Kandis	30 Unit	
	Ruang Henti Kendaraan Khusus (RHK), Zebra Cross	Simpang 4 Kantor Bupati	30 Unit	
	Pengadaan PJUTS Desa Pulau Rengas	Pulau Rengas- Jangkat	30 Titik	
	Pengadaan PJUTS Desa Sekancing	Pulau Rengas- Jangkat	40 Titik	
	Pengadaan PJUTS Desa Muara Siau	Pulau Rengas- Jangkat	30 Titik	
	Pengadaan PJUTS Desa Pasar Masurai	Pulau Rengas- Jangkat	40 Titik	
	Pengadaan PJUTS Desa Pulau Tengah	Pulau Rengas- Jangkat	30 Titik	
	Pengadaan PJUTS Desa Muara Madras	Pulau Rengas- Jangkat	40 Titik	
	Pengadaan PJUTS Desa Tuo	Pulau Rengas- Jangkat	30 Titik	
	Pemasangan ZOOS	KAB.TANJABAR	4 Unit	
	RPPJ		4 Unit	
	Rambu Darat		100 Unit	
	PJU		50 Unit	
	Traffic Light		4 Unit	
	Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Solar Cell	KAB.BUNGO	20 Unit	
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jalan Lingkar Bandara Muara Bungo Kec. Rimbo Tengah	1 Unit	
	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Ruas Jalan Provinsi Muara Bungo - Pelayang (SD Negeri 112/II Purwo Bhakti) - Kec. Bathin III	900 M2	
	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Ruas Jalan Provinsi Simpang Pasar Lubuk Landai - Simpang Lintas Sumatera Ds. Sungai Lilin	3.500 M2	
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Ruas Jalan Provinsi Simp. Lintas Sumatera Jemb. Batang Bungo - Simp. Pelayang	200 Meter	
	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Tiang F	Ruas Jalan Provinsi Muara Bungo - Tanah Tumbuh (Bukit Patah Dusun Teluk Pandak)	3 Unit	
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Simpang Tiga Dusun Candi ke Dusun Bedaro - Kec. Tanah Sepenggal	600 Meter	

	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Ruas Jalan Provinsi Simpang Dusun Pelayang - Dusun Limbur Lubuk Mengkuang	20 Unit	
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Standar	Ruas Jalan Provinsi Simpang Dusun Pelayang - Dusun Limbur Lubuk Mengkuang	400 Unit	
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	KAB.SAROLANGUN	2 Paket	
	Peningkatan APILL		2 Paket	
	Rambu Petunjuk Arah		1 Paket	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana ASDP			
	Halte Angkutan Sungai	KOTA JAMBI	2 Paket	
	Pembangunan Dermaga Desa teluk	KAB.BATANGHARI	1 Unit	
	Pembangunan Dermaga Desa Pulau Raman		1 Unit	
	Pembangunan Dermaga Desa Mersam		1 Unit	
	Pembangunan Dermaga Desa Sungai Baung		1 Unit	
	Pembangunan Dermaga Desa Tebing Tinggi Rt.02		1 Unit	
	Halte Sungai Desa Sungai Jering, Kec. Pengabuan	KAB.TANJABAR	1 Unit	
	Halte Sungai Desa Parit Bilal, Kec. Pengabuan		1 Unit	
	Halte Sungai Desa Sungai Dungun, Kec. Kuala Betara		1 Unit	
	Halte Sungai Desa Sungai Dualap, Kec. Kuala Betara		1 Unit	
	Halte Sungai Desa Suak Labu, Kec. Kuala Betara		1 Unit	
	Halte Sungai Desa Sungai Semau, Kec. Bram Itam		1 Unit	
	Halte Sungai Desa Kuala Kahar, Kec. Seberang Kota		1 Unit	
	Halte Sungai Desa Teluk Sialang, Kec. Tungkal Ilir		1 Unit	

Berdasarkan usulan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pada usulan terkait urusan perhubungan dengan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang mencakup pengadaan RPPJ, marka jalan, pagar pengaman, hingga alat pengendali isyarat lalu lintas yang diklasifikasikan sebagai prioritas utama. Hal ini dipandang sangat penting karena peningkatan fasilitas perlengkapan jalan merupakan bagian langsung dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah, yaitu menjamin tersedianya perlengkapan jalan dalam kondisi ideal untuk menekan angka kecelakaan. Usulan strategis seperti peningkatan APILL menjadi ATCS di Kota Jambi serta rencana Fly Over akan ditindaklanjuti melalui pembahasan mendalam dengan OPD terkait guna mengurai titik kemacetan secara permanen. Sementara itu, usulan infrastruktur keselamatan seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS) akan diprioritaskan pada lokasi dengan kerentanan tinggi untuk menjamin keamanan pengguna jalan di lingkungan pendidikan.
2. "Pada usulan terkait Program Pengelolaan Pelayaran, pembangunan infrastruktur berupa Dermaga Desa di Kabupaten Batanghari dan Halte Sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diklasifikasikan sebagai prioritas peningkatan konektivitas wilayah perairan. Usulan ini akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian titik lokasi pembangunan. Terhadap usulan sarana ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) di wilayah kabupaten/kota, akan didorong skema kerjasama antardaerah guna mendukung optimalisasi operasional angkutan sungai sebagai moda transportasi alternatif yang selamat dan efisien."

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi yang difokuskan untuk memberikan pedoman dalam implementasi program dan kegiatan pada sektor transportasi di Provinsi Jambi. Dengan memperhatikan kondisi, potensi, serta tantangan sektor perhubungan, arah kebijakan pembangunan sesuai dengan Renstra perhubungan di Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 diarahkan untuk:

- Menyusun rencana induk transportasi daerah yang komprehensif dan berbasis data spasial, sebagai dasar pengembangan transportasi yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi.
- Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi secara berkelanjutan, guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang/jasa, serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, pengawasan, dan informasi transportasi, untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan publik.
- Mendorong pengembangan transportasi massal berbasis darat, sungai, danau, penyeberangan (SDP), laut, dan udara yang aman, nyaman, terjangkau, serta berkelanjutan dalam rangka memperluas aksesibilitas masyarakat.
- Melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur dan kompetensi SDM perhubungan, melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bidang transportasi.
- Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan transportasi, termasuk rambu, marka jalan, lampu penerangan jalan umum, sarana keselamatan pelayaran, serta sistem navigasi penerbangan.

- Mendorong inovasi dalam layanan transportasi yang adaptif terhadap digitalisasi dan perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga sistem transportasi tetap relevan dan responsif.
- Mengintegrasikan pembangunan transportasi dengan rencana tata ruang wilayah, kawasan strategis, dan pusat pertumbuhan ekonomi, guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan daya saing daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Jambi perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam kebijakan subsektor. Hal ini dimaksudkan agar implementasi program dan kegiatan dapat lebih fokus, terarah, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan pada masing-masing moda transportasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah :

“Meningkatkan konektivitas, keselamatan, pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan transportasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung visi pembangunan Provinsi Jambi.”

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dirumuskan untuk mencapai tujuan, yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Antar Wilayah, Kualitas dan Sarana Prasarana Perhubungan, serta Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel.”

Tabel 3. 1 Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	0,537
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	40
3	Meningkatnya Kualitas dan Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	72%
4	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77
		Nilai SAKIP Dishub Prov. Jambi	66
		Hasil Monev Keterbukaan informasi badan publik kategori perangkat daerah	75

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan tindak lanjut operasional dari arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk memberikan hasil nyata yang dapat diukur melalui capaian kinerja tahunan, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat di bidang transportasi.

Perencanaan kegiatan dilakukan secara sistematis dengan menitikberatkan pada pencapaian hasil (outcome) dan manfaat langsung bagi publik. Setiap sub

kegiatan dijabarkan dengan indikator kinerja, target yang terukur, serta estimasi kebutuhan anggaran yang efektifitas dan efisiensi. Dengan demikian, pelaksanaan Renja ini diharapkan mampu memastikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan transportasi daerah, serta memperkuat peran Dinas Perhubungan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Rencana Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi serta Pagu Indikatif dan Target

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Sesuai Renja		Anggaran Tahun 2026 Sesuai RENSTRA 2025-2029	
		Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
Dinas Perhubungan			Rp58.795.923.000		Rp58.795.923.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			Rp58.795.923.000		Rp58.795.923.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		87%	Rp19.050.900.000	87%	Rp19.050.900.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp1.150.000.000	100%	Rp1.150.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp300.000.000	1 Dokumen	Rp300.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Selain Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp200.000.000	3 Dokumen	Rp200.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp100.000.000	2 Dokumen	Rp100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen(spasi)Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(spasi)	2 Dokumen	Rp100.000.000	2 Dokumen	Rp100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan	80%	Rp10.400.000.000	80%	Rp10.400.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80%	Rp9.900.000.000	80%	Rp9.900.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	Rp500.000.000	4 Laporan	Rp500.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang terlaksana	80%	Rp700.000.000	80%	Rp700.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	1 Paket	Rp300.000.000	1 Paket	Rp300.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Pegawai	Rp400.000.000	5 Pegawai	Rp400.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum yang terlaksana Persentase penyediaan(spasi)Administrasi Umum OPD	80%	Rp1.300.000.000	80%	Rp1.300.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	Rp50.000.000	4 Paket	Rp50.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp200.000.000	5 Paket	Rp200.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp250.000.000	5 Paket	Rp250.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp60.000.000	4 Dokumen	Rp60.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Rp150.000.000	5 Laporan	Rp150.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp590.000.000	12 Laporan	Rp590.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana(spasi)Tersedianya Barang/peralatan kantor	100%	Rp1.602.500.000	100%	Rp1.602.500.000

Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Rp400.000.000	1 unit	Rp400.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	Rp650.000.000	2 unit	Rp650.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Rp52.500.000	1 Paket	Rp52.500.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Paket	Rp300.000.000	3 Paket	Rp300.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Paket	Rp200.000.000	1 Paket	Rp200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa(spasi)Penunjang Urusan Pemerintah(spasi)Daerah	100%	Rp900.000.000	100%	Rp900.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Rp50.000.000	4 Laporan	Rp50.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp400.000.000	12 Laporan	Rp400.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa(spasi)Pelayanan Umum Kantor yang(spasi)Disediakan	4 Laporan	Rp450.000.000	4 Laporan	Rp450.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang(spasi)Milik Daerah Penunjang Urusan(spasi)Pemerintahan Daerah	70%	Rp2.998.400.000	70%	Rp2.998.400.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan(spasi)Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(spasi)yang dipelihara dan Dibayarkan(spasi)Pajaknya	14 Unit	Rp700.000.000	14 Unit	Rp700.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin(spasi)Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	Rp200.000.000	1 Paket	Rp200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	Rp2.098.400.000	1 Unit	Rp2.098.400.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	91%	Rp33.358.898.000	91%	Rp33.358.898.000
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Meningkatnya kualitas, perencanaan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100%	Rp2.410.000.000	100%	Rp2.410.000.000
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	5 Dokumen	Rp1.710.000.000	5 Dokumen	Rp1.710.000.000
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	12 laporan	Rp150.000.000	12 laporan	Rp150.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	70%	Rp150.000.000	70%	Rp150.000.000
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3 Dokumen	Rp400.000.000	3 Dokumen	Rp400.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya perlengkapan Jalan, prasarana keselamatan jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan berfungsi fasilitas keselamatan jalan dengan baik.	100%	Rp15.790.898.000	100%	Rp15.790.898.000
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	1 Paket	Rp3.762.000.000	1 Paket	Rp3.762.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	3 Paket	Rp11.263.898.000	3 Paket	Rp11.263.898.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	1 Paket	Rp405.000.000	1 Paket	Rp405.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	1 Paket	Rp360.000.000	1 Paket	Rp360.000.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terpenuhinya SPM Pelayanan dan operasional Terminal Tipe B	50%	Rp2.500.000.000	50%	Rp2.500.000.000
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	-	-	-	-
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	-	-	-	-

Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang terminal	2 Paket	Rp500.000.000	2 Paket	Rp500.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Lokasi	Rp1.000.000.000	2 Lokasi	Rp1.000.000.000
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	60 Personil	Rp1.000.000.000	60 Personil	Rp1.000.000.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%	Rp2.200.000.000	100%	Rp2.200.000.000
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	3 laporan	Rp800.000.000	3 laporan	Rp800.000.000
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	1 Paket	Rp200.000.000	1 Paket	Rp200.000.000
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Dokumen	Rp150.000.000	1 Dokumen	Rp150.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 laporan	Rp900.000.000	1 laporan	Rp900.000.000
Forum LLAJ untuk Jaringan jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 laporan	Rp150.000.000	1 laporan	Rp150.000.000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Terpenuhinya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	100%	Rp200.000.000	100%	Rp200.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 laporan	Rp100.000.000	1 laporan	Rp100.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 laporan	Rp100.000.000	1 laporan	Rp100.000.000

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya kegiatan inspeksi, pengawasan, pemantauan dan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Jalan	100%	Rp1.125.000.000	100%	Rp1.125.000.000
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	Rp300.000.000	1 Orang	Rp300.000.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 laporan	Rp150.000.000	1 laporan	Rp150.000.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 laporan	Rp150.000.000	1 laporan	Rp150.000.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	3 Laporan	Rp325.000.000	3 Laporan	Rp325.000.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 laporan	Rp200.000.000	1 laporan	Rp200.000.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang berkeselamatan	100%	Rp6.686.000.000	100%	Rp6.686.000.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Unit	Rp4.788.000.000	5 Unit	Rp4.788.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	2 Laporan	Rp1.898.000.000	2 Laporan	Rp1.898.000.000
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Antar Kota Antar Kabupaten	55%	Rp347.000.000	55%	Rp347.000.000
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Rp97.000.000	1 Dokumen	Rp97.000.000

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Antar Kabupaten	-	-	-	-
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-	-	-	-
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-	-	-	-
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Antar Kabupaten	-	-	-	-
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan (spasi) Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten	-	-	-	-
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang	-	-	-	-

dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp400.000.000	100%	Rp400.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	1 laporan	Rp200.000.000	1 laporan	Rp200.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi(spasi)Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan(spasi)Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Rp200.000.000	1 Dokumen	Rp200.000.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp400.000.000	100%	Rp400.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1 laporan	Rp200.000.000	1 laporan	Rp200.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 laporan	Rp200.000.000	1 laporan	Rp200.000.000
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp1.300.000.000	100%	Rp1.300.000.000

Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Rp200.000.000	1 Dokumen	Rp200.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 laporan	Rp350.000.000	1 laporan	Rp350.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	Rp750.000.000	2 Laporan	Rp750.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Layanan Transportasi Laut	100%	Rp6.386.125.000	100%	Rp6.386.125.000
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp350.000.000	100%	Rp350.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Unit	Rp200.000.000	1 Unit	Rp200.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 laporan	Rp150.000.000	1 laporan	Rp150.000.000
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Terpenuhinya izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	100%	Rp350.000.000	100%	Rp350.000.000

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	1 Unit	Rp175.000.000	1 Unit	Rp175.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1 laporan	Rp175.000.000	1 laporan	Rp175.000.000
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Terpenuhinya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	100%	Rp1.101.125.000	100%	Rp1.101.125.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	1 Unit	Rp951.125.000	1 Unit	Rp951.125.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 laporan	Rp150.000.000	1 laporan	Rp150.000.000
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Terwujudnya jaringan Lintas Penyeberangan dan sertifikasi kapal dalam daerah Provinsi Jambi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau(spasi)Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	100%	Rp400.000.000	100%	Rp400.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Rp400.000.000	1 Dokumen	Rp400.000.000

	pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Rp250.000.000	100%	Rp250.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Rp125.000.000	1 Dokumen	Rp125.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 laporan	Rp125.000.000	1 laporan	Rp125.000.000
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Terpenuhinya Perizinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau(spasi)Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100%	Rp350.000.000	100%	Rp350.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan	1 Dokumen	Rp150.000.000	1 Dokumen	Rp150.000.000

Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 laporan	Rp200.000.000	1 laporan	Rp200.000.000
Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah(spasi)Provinsi	Terwujudnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	100%	Rp285.000.000	100%	Rp285.000.000
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Rp150.000.000	1 Dokumen	Rp150.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp75.000.000	1 Dokumen	Rp75.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp60.000.000	1 laporan	Rp60.000.000
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersediannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan	100%	Rp1.550.000.000	100%	Rp1.550.000.000

	(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan(spasi)Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah(spasi)Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan(spasi)Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen	Rp550.000.000	4 Dokumen	Rp550.000.000
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana(spasi)Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(spasi)(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan(spasi)(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Rp150.000.000	1 Dokumen	Rp150.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan(spasi)Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 laporan	Rp850.000.000	1 laporan	Rp850.000.000
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya dan Terpeliharanya serta beroperasinya Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan(spasi)Pembangunan dan(spasi)Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	-	-	-	-
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	-	-	-	-
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	-	-	-	-
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	-
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangun dan terwujudnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Rp500.000.000	100%	Rp500.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan(spasi)Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani(spasi)Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	-	-	-	-

Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	-	-	-	-
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah(spasi)Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	1 Unit	Rp500.000.000	1 Unit	Rp500.000.000
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp500.000.000	100%	Rp500.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 laporan	Rp250.000.000	1 laporan	Rp250.000.000
Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem(spasi)Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	-
Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp300.000.000	100%	Rp300.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Unit	Rp150.000.000	1 Unit	Rp150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan(spasi)Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 laporan	Rp150.000.000	1 laporan	Rp150.000.000
Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan(spasi)Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan(spasi)Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan(spasi)Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di(spasi)Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan(spasi)Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	-
Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	Rp450.000.000	100%	Rp450.000.000
Fasilitasi Pemenuhan(spasi)Izin Reklamasi di Wilayah Perairan(spasi)Pengumpan Regional dalam Sistem(spasi)Perizinan(spasi)Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan	1 Dokumen	Rp450.000.000	1 Dokumen	Rp450.000.000

	Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	-
Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan(spasi)Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	-
Koordinasi, monitoring, dan sinkronisasi pengawasan, pengendalian, dan penertiban operasional angkutan laut	Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan laut dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing	-	-	-	-
Fasilitasi percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	Laporan Hasil Fasilitasi percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	-	-	-	-
Penyusunan dokumen kerja sama pihak ketiga dalam pengembangan Pelabuhan	Jumlah dokumen kerja sama pihak ketiga dalam pengembangan Pelabuhan	-	-	-	-

BAB IV(spasi)RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026 disesuaikan dengan Pagu Indikatif Rancangan KUA-PPAS. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026, merupakan gambaran dari Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Jambi untuk menunjang Jambi MANTAP 2029.

Berikut merupakan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026 :

Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Jambi		Rp58.795.923.000	PAD			Rp61.875.477.000		
1	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jambi	77	Rp19.050.900.000	PAD	77,55	Rp19.130.750.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jambi	66			67		
2	15	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	100%	Rp1.150.000.000	PAD	100%	Rp1.300.000.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jambi	1 Dokumen	Rp300.000.000	PAD	1 Dokumen	Rp350.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jambi	1 Dokumen	Rp250.000.000	PAD	1 Dokumen	Rp300.000.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Selain Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jambi	1 Dokumen	Rp200.000.000	PAD	1 Dokumen	Rp250.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jambi	1 Dokumen	Rp100.000.000	PAD	1 Dokumen	Rp100.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen(spasi)Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jambi	1 Dokumen	Rp100.000.000	PAD	1 Dokumen	Rp100.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(spasi)	Jambi	1 Dokumen	Rp100.000.000	PAD	1 Dokumen	Rp100.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jambi	1 Dokumen	Rp100.000.000	PAD	1 Dokumen	Rp100.000.000

1	15	01	1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan	Jambi	80%	Rp10.400.000.000	PAD		85%	Rp10.920.000.000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jambi	80%	Rp9.900.000.000	PAD		80%	Rp10.300.000.000
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jambi	4 Laporan	Rp500.000.000	PAD		4 Laporan	Rp620.000.000
1	15	01	1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang terlaksana	Jambi	80%	Rp700.000.000	PAD		85%	Rp760.000.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jambi	1 Paket	Rp300.000.000	PAD		1 Paket	Rp300.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jambi	5 Pegawai	Rp400.000.000	PAD		5 Pegawai	Rp460.000.000
1	15	01	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum yang terlaksana Persentase penyediaan(spasi)Administrasi Umum OPD	Jambi	80%	Rp1.300.000.000	PAD		80%	Rp1.300.000.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jambi	4 Paket	Rp50.000.000	PAD		4 Paket	Rp50.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jambi	5 Paket	Rp200.000.000	PAD		5 Paket	Rp200.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jambi	5 Paket	Rp250.000.000	PAD		5 Paket	Rp250.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jambi	4 Dokumen	Rp60.000.000	PAD		4 Dokumen	Rp50.000.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jambi	5 Laporan	Rp150.000.000	PAD		5 Laporan	Rp150.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jambi	12 Laporan	Rp590.000.000	PAD		12 Laporan	Rp600.000.000
1	15	01	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana(spasi)Tersedianya Barang/peralatan kantor	Jambi	100%	Rp1.602.500.000	PAD		100%	Rp952.500.000
				Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jambi	1 unit	Rp400.000.000	PAD		1 unit	Rp400.000.000

				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jambi	2 unit	Rp650.000.000	PAD		0 unit	Rp0
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jambi	1 Paket	Rp52.500.000	PAD		1 Paket	Rp52.500.000
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jambi		-	PAD			Rp0
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jambi	3 Paket	Rp300.000.000	PAD		3 Paket	Rp300.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jambi	1 Paket	Rp200.000.000	PAD		1 Paket	Rp200.000.000
1	15	01	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa(spasi)Penunjang Urusan Pemerintah(spasi)Daerah	Jambi	100%	Rp900.000.000	PAD		100%	Rp1.000.000.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jambi	4 Laporan	Rp50.000.000	PAD		4 Laporan	Rp50.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jambi	12 Laporan	Rp400.000.000	PAD		12 Laporan	Rp500.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa(spasi)Pelayanan Umum Kantor yang(spasi)Disediakan	Jambi	4 Laporan	Rp450.000.000	PAD		4 Laporan	Rp450.000.000
1	15	01	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang(spasi)Milik Daerah Penunjang Urusan(spasi)Pemerintahan Daerah	Jambi	70%	Rp2.998.400.000	PAD		80%	Rp2.898.250.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan(spasi)Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan(spasi)yang dipelihara dan Dibayarkan(spasi)Pajaknya	Jambi	14 Unit	Rp700.000.000	PAD		14 Unit	Rp800.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin(spasi)Lainnya yang Dipelihara	Jambi	1 Paket	Rp200.000.000	PAD		1 Paket	Rp350.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jambi	1 Unit	Rp2.098.400.000	PAD		1 Unit	Rp1.748.250.000
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	Jambi	100%	Rp33.358.898.000	PAD		100%	Rp30.068.602.000
2	15	02	1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Meningkatnya kualitas, perencanaan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jambi	100%	Rp2.410.000.000	PAD		100%	Rp2.331.000.000

				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jambi	5 Dokumen	Rp1.710.000.000	PAD		5 Dokumen	Rp1.611.000.000
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jambi	12 laporan	Rp150.000.000	PAD		12 laporan	Rp150.000.000
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jambi	70%	Rp150.000.000	PAD		80%	Rp150.000.000
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jambi	3 Dokumen	Rp400.000.000	PAD		3 Dokumen	Rp420.000.000
2	15	03	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya perlengkapan Jalan, prasarana keselamatan jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan berfungsi fasilitas keselamatan jalan dengan baik.	Jambi	100%	Rp15.790.898.000	PAD		100%	Rp14.454.602.000
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Jambi	1 Paket	Rp3.762.000.000	PAD		1 Paket	Rp1.762.000.000
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Jambi	1 Paket	Rp11.263.898.000	PAD		1 Paket	Rp11.927.602.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Jambi	1 Paket	Rp405.000.000	PAD		1 Paket	Rp405.000.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Jambi	1 Paket	Rp360.000.000	PAD		1 Paket	Rp360.000.000
2	15	04	1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terpenuhinya SPM Pelayanan dan operasional Terminal Tipe B	Jambi	50%	Rp2.500.000.000	PAD		80%	Rp3.500.000.000
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jambi	-	-	PAD		4 Dokumen	Rp1.000.000.000
				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jambi	-	-	PAD		-	Rp0
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang terminal	Jambi	2 Paket	Rp500.000.000	PAD		3 Paket	Rp500.000.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Jambi	2 Lokasi	Rp1.000.000.000	PAD		2 Lokasi	Rp1.000.000.000

				Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	Jambi	60 Personil	Rp1.000.000.000	PAD		60 Personil	Rp1.000.000.000
2	15	05	1.04	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jambi	100%	Rp2.200.000.000	PAD		100%	Rp1.700.000.000
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jambi	3 laporan	Rp800.000.000	PAD		3 laporan	Rp300.000.000
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Jambi	1 Paket	Rp200.000.000	PAD		1 Paket	Rp200.000.000
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jambi	1 Dokumen	Rp150.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp150.000.000
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jambi	1 laporan	Rp900.000.000	PAD		1 laporan	Rp900.000.000
				Forum LLAJ untuk Jaringan jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jambi	1 laporan	Rp150.000.000	PAD		1 laporan	Rp150.000.000
2	15	06	1.05	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Terpenuhinya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jambi	100%	Rp200.000.000	PAD		100%	Rp200.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jambi	1 laporan	Rp100.000.000	PAD		1 laporan	Rp100.000.000
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Jambi	1 laporan	Rp100.000.000	PAD		1 laporan	Rp100.000.000
2	15	07	1.06	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya kegiatan inspeksi, pengawasan, pemantauan dan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Jalan	Jambi	100%	Rp1.125.000.000	PAD		100%	Rp1.125.000.000
				Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jambi	1 Orang	Rp300.000.000	PAD		1 Orang	Rp300.000.000
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jambi	1 laporan	Rp150.000.000	PAD		1 laporan	Rp150.000.000
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jambi	1 laporan	Rp150.000.000	PAD		1 laporan	Rp150.000.000
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan	Jambi	4 Laporan	Rp325.000.000	PAD		4 Laporan	Rp325.000.000

				penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi	Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi							
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jambi	1 laporan	Rp200.000.000	PAD		1 laporan	Rp200.000.000
2	15	08	1.07	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang berkeselamatan	Jambi	100%	Rp6.686.000.000	PAD		100%	Rp3.121.000.000
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jambi	5 Unit	Rp4.788.000.000	PAD		10 Unit	Rp2.223.000.000
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jambi	2 Laporan	Rp1.898.000.000	PAD		2 Laporan	Rp898.000.000
2	15	09	1.08	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Antar Kota Antar Kabupaten	Jambi	55%	Rp347.000.000	PAD		55%	Rp447.000.000
				Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jambi	1 Dokumen	Rp97.000.000	PAD		2 Dokumen	Rp197.000.000
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jambi	1 Dokumen	Rp250.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp250.000.000
2	15	10	1.09	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Antar Kabupaten	Jambi	-	-	PAD		70 %	Rp250.000.000
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jambi	-	-	PAD		-	Rp0

				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jambi	-	-	PAD		1 Dokumen	Rp250.000.000
2	15	11	1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Antar Kabupaten	Jambi	-	-	PAD		30 %	Rp340.000.000
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan (spasi)Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jambi	-	-	PAD		1 Dokumen	Rp340.000.000
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jambi	-	-	PAD		-	Rp0
2	15	12	1.11	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten	Jambi	-	-	PAD		20 %	Rp500.000.000
				Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jambi	-	-	PAD		1 Dokumen	Rp300.000.000
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jambi	-	-	PAD		1 Dokumen	Rp200.000.000
2	15	13	1.12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	100%	Rp400.000.000	PAD		100%	Rp400.000.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jambi	1 laporan	Rp200.000.000	PAD		1 laporan	Rp200.000.000

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi(spasi)Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan(spasi)Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jambi	1 Dokumen	Rp200.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp200.000.000
2	15	14	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	100%	Rp400.000.000	PAD		100%	Rp400.000.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jambi	1 laporan	Rp200.000.000	PAD		1 laporan	Rp200.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jambi	1 laporan	Rp200.000.000	PAD		1 laporan	Rp200.000.000
2	15	15	1.14	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	100%	Rp1.300.000.000	PAD		100%	Rp1.300.000.000
				Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jambi	1 Dokumen	Rp200.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp200.000.000
				Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jambi	1 laporan	Rp350.000.000	PAD		1 laporan	Rp350.000.000
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan	Jambi	3 Laporan	Rp750.000.000	PAD		3 Laporan	Rp750.000.000

				Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
2	15	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Layanan Transportasi Laut	Jambi	100%	Rp6.386.125.000	PAD		100%	Rp12.676.125.000
2	15	03	1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	100%	Rp350.000.000	PAD		100%	Rp350.000.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jambi	1 Unit	Rp200.000.000	PAD		1 Unit	Rp200.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jambi	1 laporan	Rp150.000.000	PAD		1 laporan	Rp150.000.000
2	15	03	1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Terpenuhinya izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jambi	100%	Rp350.000.000	PAD		100%	Rp350.000.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jambi	1 Unit	Rp175.000.000	PAD		1 Unit	Rp175.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jambi	1 laporan	Rp175.000.000	PAD		1 laporan	Rp175.000.000
2	15	03	1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah	Terpenuhinya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah	Jambi	100%	Rp1.101.125.000	PAD		100%	Rp1.151.125.000

				Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan							
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Jambi	1 Unit	Rp951.125.000	PAD		1 Unit	Rp976.125.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jambi	1 laporan	Rp150.000.000	PAD		1 laporan	Rp175.000.000
2	15	03	1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Terwujudnya jaringan Lintas Penyeberangan dan sertifikasi kapal dalam daerah Provinsi Jambi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau(spasi)Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jambi	100%	Rp400.000.000	PAD		100%	Rp450.000.000
				Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jambi	1 Dokumen	Rp400.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp450.000.000
2	15	03	1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	100%	Rp250.000.000	PAD		100%	Rp250.000.000
				Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provins	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jambi	1 Dokumen	Rp125.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp125.000.000
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah	Jambi	1 laporan	Rp125.000.000	PAD		1 laporan	Rp125.000.000

				Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							
2	15	03	1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Terpenuhinya Perizinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau(spasi)Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jambi	100%	Rp350.000.000	PAD		100%	Rp500.000.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jambi	1 Dokumen	Rp150.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp300.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jambi	1 laporan	Rp200.000.000	PAD		1 laporan	Rp200.000.000
2	15	03	1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah(spasi)Provinsi	Terwujudnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jambi	100%	Rp285.000.000	PAD		100%	Rp285.000.000
				Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas		Jambi	1 Dokumen	Rp150.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp150.000.000

				Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota							
				Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	1 Dokumen	Rp75.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp75.000.000
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	1 laporan	Rp60.000.000	PAD		1 laporan	Rp60.000.000
2	15	03	1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	100%	Rp1.550.000.000	PAD		100%	Rp1.640.000.000
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan(spasi)Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah(spasi)Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan(spasi)Pengumpan Regional	Jambi	4 Dokumen	Rp550.000.000	PAD		4 Dokumen	Rp580.000.000
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana(spasi)Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(spasi)(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan(spasi)(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	1 Dokumen	Rp150.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp180.000.000
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan(spasi)Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	1 laporan	Rp850.000.000	PAD		1 laporan	Rp880.000.000
2	15	03	1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	-	-	PAD		100 %	Rp700.000.000

				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan(spasi)Pembangunan dan(spasi)Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jambi	-	-	PAD		-	Rp. 0
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Jambi	-	-	PAD		-	Rp. 0
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Jambi	-	-	PAD		1 Unit	Rp500.000.000
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	-	-	PAD		1 Laporan	Rp200.000.000
2	15	03	1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangun dan terwujudnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jambi	100%	Rp500.000.000	PAD		100%	Rp4.000.000.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan(spasi)Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani(spasi)Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jambi	-	-	PAD		1 Unit	Rp700.000.000
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Jambi	-	-	PAD		1 Unit	Rp2.500.000.000
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah(spasi)Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Jambi	1 Unit	Rp500.000.000	PAD		1 Unit	Rp500.000.000
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jambi	-	-	PAD		1 Laporan	Rp300.000.000
2	15	03	1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	100%	Rp500.000.000	PAD		100%	Rp450.000.000

				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jambi	1 Dokumen	Rp250.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp200.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	1 laporan	Rp250.000.000	PAD		1 laporan	Rp250.000.000
2	15	03	1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	-	-	PAD		100 %	Rp500.000.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem(spasi)Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jambi	-	-	PAD		1 Dokumen	Rp350.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	-	-	PAD		1 laporan	Rp150.000.000
2	15	03	1.13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	100%	Rp300.000.000	PAD		100%	Rp300.000.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jambi	1 Unit	Rp150.000.000	PAD		1 Unit	Rp150.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan(spasi)Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	1 laporan	Rp150.000.000	PAD		1 laporan	Rp150.000.000
2	15	03	1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	-	-	PAD		100 %	Rp550.000.000

				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan(spasi)Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan(spasi)Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jambi	-	-	PAD		1 Dokumen	Rp400.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan(spasi)Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di(spasi)Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan(spasi)Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	-	-	PAD		1 laporan	Rp150.000.000
2	15	03	1.15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	100%	Rp450.000.000	PAD		100%	Rp600.000.000
				Fasilitasi Pemenuhan(spasi)Izin Reklamasi di Wilayah Perairan(spasi)Pengumpan Regional dalam Sistem(spasi)Perizinan(spasi)Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jambi	1 Dokumen	Rp450.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp450.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	-	-	PAD		1 Laporan	Rp150.000.000
2	15	03	1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	-	-	PAD		100 %	Rp350.000.000
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan(spasi)Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jambi	-	-	PAD		1 Dokumen	Rp300.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jambi	-	-	PAD		1 laporan	Rp50.000.000

2	15	03	1.17	Koordinasi, monitoring, dan sinkronisasi pengawasan, pengendalian, dan penertiban operasional angkutan laut	Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan laut dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing	Jambi	-	-	PAD		100 %	Rp250.000.000
				Fasilitasi percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	Laporan Hasil Fasilitasi percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	Jambi	-	-	PAD		1 Laporan	Rp50.000.000
				Penyusunan dokumen kerja sama pihak ketiga dalam pengembangan Pelabuhan	Jumlah dokumen kerja sama pihak ketiga dalam pengembangan Pelabuhan	Jambi	-	-	PAD		1 Dokumen	Rp200.000.000

BAB V(spasi)PENUTUP

Keberhasilan pembangunan bidang perhubungan tidak hanya ditentukan oleh kerja keras sektor transportasi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sinergi lintas sektor dalam pembangunan daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah dan peningkatan keselamatan transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tahun 2026 sesuai arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, yang berorientasi pada terwujudnya sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan.

Namun demikian, perlu disadari bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU). Penurunan jumlah anggaran pada Tahun 2026 berdampak langsung terhadap tidak tercapainya sebagian target IKU, khususnya pada sektor pelayanan fasilitas keselamatan (faskes) dan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Trans Siginjai yang untuk sementara ditiadakan. Kondisi ini menuntut adanya strategi adaptif dalam perencanaan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar pelayanan publik di bidang transportasi tetap berjalan optimal. Permasalahan berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, penertiban dan pengawasan operasional sektor perhubungan baik LLAJ, Sungai, Laut maupun Udara yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya yang ada; keterbatasan kewenangan Provinsi di sektor perhubungan khususnya perhubungan laut dan udara.
2. Belum tuntasnya proses perencanaan yang berkelanjutan khususnya perencanaan pembangunan jalan kereta api trans sumatera di Provinsi Jambi dan tindak lanjut Penyusunan Master Plan Angkutan Sungai Provinsi Jambi, karena tidak tersedianya alokasi dana.
3. Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat overloading karena belum didukung oleh

prasarana dan fasilitas pendukung pengawasan angkutan yang sesuai kebutuhan operasional dan standar yang ditetapkan

Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan dukungan seluruh jajaran serta sinergi pemerintah kabupaten/kota. Rencana kerja ini sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sektor perhubungan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2026 ini disusun. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini disampaikan apresiasi dan terima kasih. Semoga Renja ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan sistem transportasi Provinsi Jambi yang lebih maju dan berdaya saing di masa mendatang.

Jambi, 2025

KEPALA DINAS,

Drs. JOHN EKA POWA, ME

Pembina Utama Madya

NIP. 19681220 198810 1 001